

BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual telah banyak dilakukan oleh para peneliti di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penelitian mengenai tingkat maupun kualitas pengungkapan modal intelektual dilakukan di negara-negara Eropa seperti Italia (Bozzolan *et al.*, 2003), Denmark (Bukh, Nielsen, Gormsen, & Mouritsen, 2005), dan Inggris (Li *et al.*, 2008; Cordazzo & Vergauwen, 2012; Zourarakis, 2013). Beberapa penelitian lain dilakukan di Australia (White, Lee, & Tower, 2007; Bruggen, Vergauwen, & Dao, 2009; Woodcock & Whiting, 2011).

Penelitian juga dilakukan di negara-negara Asia seperti Cina (Huafang & Jianguo, 2007), Hongkong (Petty & Cuganesan, 2005), Singapura (Firer & Williams, 2003; Singh & Van Der Zahn, 2008), dan Jepang (Rimmel, Nielsen, & Yosano, 2009). Sebagian besar penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual dilakukan pada negara maju dengan asumsi bahwa negara maju telah terlebih dahulu melakukan transformasi ekonomi ke basis pengetahuan (Abeysekera, 2007). Beberapa penelitian pada negara berkembang seperti India (Jindal & Kumar, 2012), Bangladesh (Nurunnabi & Hossain, 2011), Malaysia (Yau, Chun, & Balaraman, 2009; Taliyang & Jusop, 2011; Azman & Kamaluddin, 2012; Haji & Ghazali, 2013), serta Indonesia (Purnomosidhi, 2006; Falikhatun, Aryani, & Prabowo, 2009) juga dilakukan.

Menurut berbagai studi yang telah dilakukan, pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor tersebut seperti tata kelola perusahaan (Barako *et al.*, 2006; Huafang & Jianguo, 2007; Li *et al.*, 2008; Falikhatun *et al.*, 2009; Yau *et al.*, 2009; Hidalgo *et al.*, 2011; Taliyang & Jusop, 2011; Rashid *et al.*, 2012, Haji & Ghazali, 2013) dan karakteristik perusahaan (Bruggen *et al.*, 2009; Woodcock & Whiting, 2011; Ferreira, Branco, & Moreira, 2012; Dewi, Young, & Sundari, 2014).

Variabel yang sering digunakan dalam penelitian terdahulu adalah ukuran dewan direksi (Zhou & Chen, 2004; Akhtaruddin & Hossain, 2009; Rashid *et al.*, 2012; Chiedu, Ibikunle, & Damagum, 2013; Moeinfar, Amouzesh, & Mousavi, 2013; Haji & Ghazali, 2013), komisaris independen (White *et al.*, 2007; Huafang & Jianguo, 2007; Li *et al.*, 2008; Falikhatun *et al.*, 2009), komite audit (Ho & Wong, 2001; Barako *et al.*, 2006; Li *et al.*, 2008). Selain ketiga variabel tersebut, Hidalgo *et al.* (2011) menambah variabel dualitas CEO dalam penelitian yang dilakukan di Meksiko.

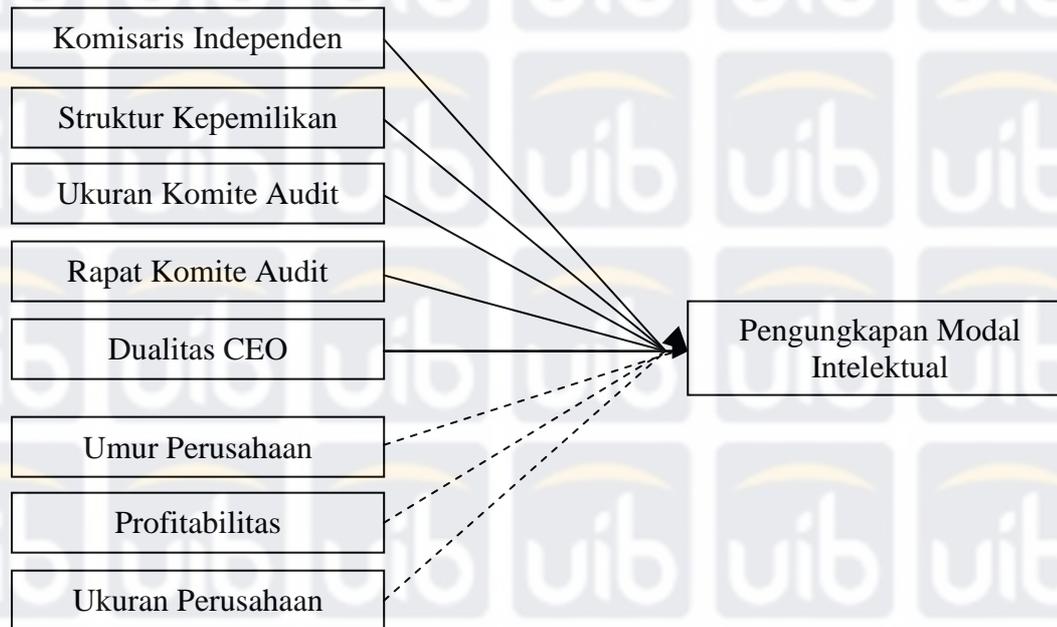
Faktor lain yang diteliti untuk mengetahui pengaruh yang ada terhadap pengungkapan modal intelektual adalah rapat komite audit (Li *et al.*, 2008; Taliyang & Jusop, 2011; Azman & Kamaluddin, 2012; Li, Mangena, & Pike, 2012), auditor eksternal (Firer & Williams, 2003; Barako *et al.*, 2006; Woodcock & Whiting, 2011; Nurunnabi & Hossain, 2011; Jindal & Kumar, 2012; Ousama, Fatima, & Rashid, 2012; Rashid *et al.*, 2012). Faktor mengenai struktur kepemilikan juga banyak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual.

Bukh *et al.* (2005) dan Falikhatun *et al.* (2009) menggunakan salah satu variabel struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial. Selain variabel kepemilikan manajerial, Firer dan Williams (2003) menambahkan variabel konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan pemerintah dalam penelitian yang dilakukan. Variabel konsentrasi kepemilikan juga digunakan dalam penelitian lain (Barako *et al.*, 2006; White *et al.*, 2007; Li *et al.*, 2008; Woodcock & Whiting, 2011). Variabel struktur kepemilikan lain yang digunakan adalah kepemilikan institusional (Barako *et al.*, 2006; Hidalgo *et al.*, 2011), kepemilikan asing (Barako *et al.*, 2006; Huafang & Jianguo, 2007), dan kepemilikan pemerintah (Yau *et al.*, 2009; Haji & Ghazali, 2013).

Penelitian-penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual dilakukan oleh Cerbioni dan Parbonetti (2007). Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran dewan, komisaris independen, dualitas CEO, dan struktur dewan. Perusahaan bioteknologi yang terdaftar di negara-negara Eropa tahun 2002-2004 dijadikan sampel penelitian. White *et al.* (2007) melakukan penelitian di Australia pada tahun yang sama. Variabel penelitian yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, umur perusahaan, dan tingkat utang. Sampel yang digunakan adalah 96 perusahaan bioteknologi yang terdaftar di Australia pada tahun 2005.

Li *et al.* (2008) melakukan penelitian tentang pengungkapan modal intelektual dan tata kelola perusahaan di Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara pengungkapan modal intelektual dan variabel

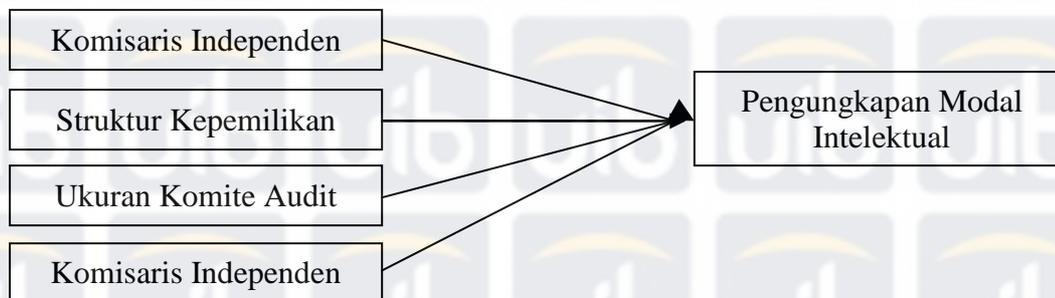
tata kelola perusahaan seperti komisaris independen, struktur kepemilikan, ukuran komite audit, rapat komite audit, dan dualitas CEO. Model penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Li *et al.* (2008) dapat dilihat dari tampilan Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Model penelitian pengungkapan modal intelektual dan struktur tata kelola perusahaan di Inggris, sumber: Li *et al.* (2008)

Penelitian mengenai tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual juga dilakukan oleh Taliyang dan Jusop (2011) di Malaysia. Penelitian ini menilai tingkat pengungkapan modal intelektual dan hubungannya dengan variabel tata kelola perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 150 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia yang termasuk dalam lima jenis industri yang telah dipilih. Penelitian ini menggunakan variabel independen seperti komisaris independen, peran dualitas, ukuran komite audit, dan frekuensi

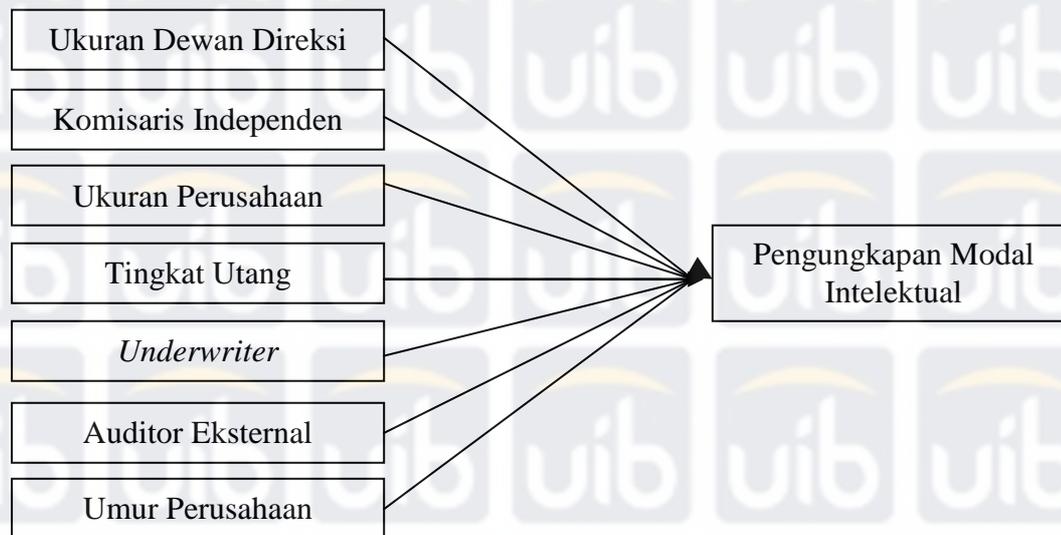
rapat komite audit. Model penelitian yang dilakukan Taliyang dan Jusop (2011) dapat dilihat dari Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2 Model penelitian pengungkapan modal intelektual dan struktur tata kelola perusahaan di Malaysia, sumber: Taliyang dan Jusop (2011)

Beberapa penelitian lain telah banyak dilakukan di Malaysia. Yau *et al.* (2009) meneliti tentang tingkat dan sifat pengungkapan modal intelektual oleh perusahaan publik yang terdaftar di Malaysia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengungkapan modal intelektual dapat dijelaskan oleh aspek ekonomi atau alasan lain dari pengungkapan perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan, dan jenis industri sebagai variabel independen dalam penelitian.

Penelitian serupa dilakukan oleh Rashid *et al.* (2012) di Malaysia. Studi tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual pada perusahaan-perusahaan IPO di Malaysia. Variabel yang digunakan adalah ukuran dewan direksi, komisaris independen, ukuran perusahaan, umur perusahaan, tingkat utang, *underwriter*, auditor eksternal, dan umur perusahaan. Gambar 2.3 berikut ini menunjukkan model penelitian yang dilakukan oleh Rashid *et al.* (2012):



Gambar 2.3 Model penelitian pengungkapan modal intelektual dalam prospektus IPO di malaysia, sumber: Rashid *et al.* (2012)

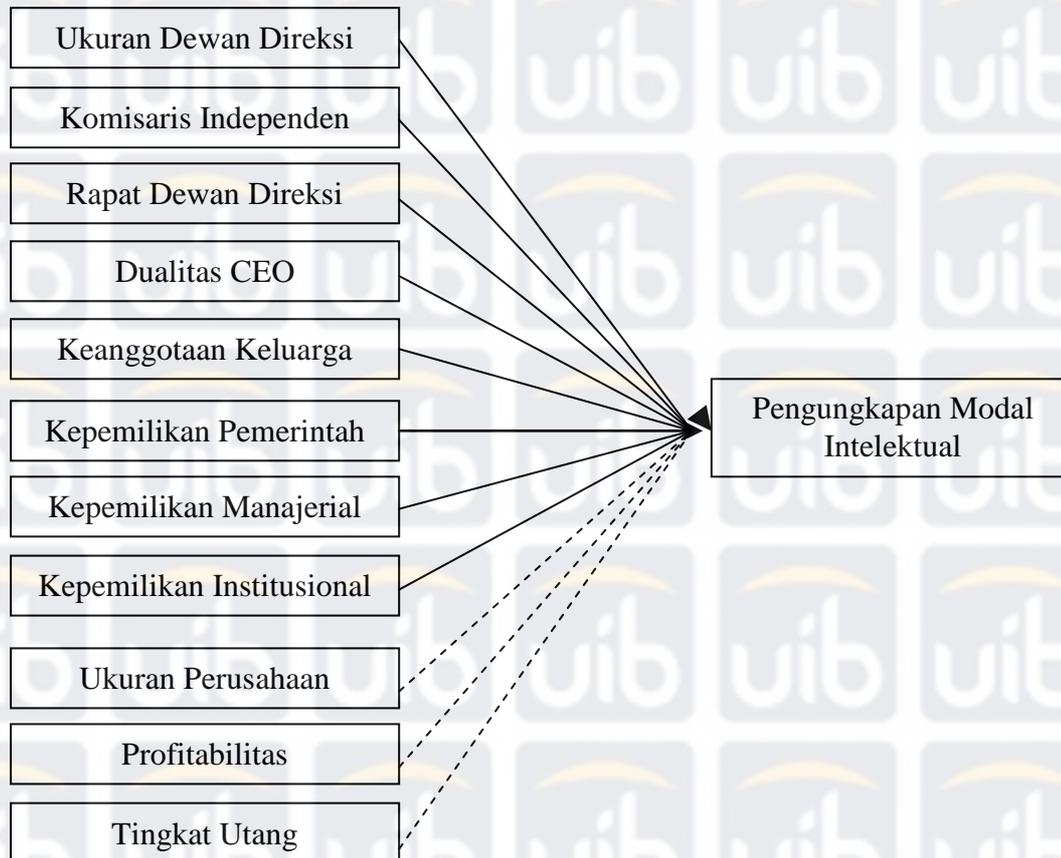
Abeyssekera (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh salah satu dari unsur tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian yang dilakukan di Kenya tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian dilakukan pada 26 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nairobi dengan kapitalisasi pasar terbesar pada tahun 2002 dan 2003.

Penelitian secara spesifik juga dilakukan oleh Li *et al.* (2012) dengan menggunakan variabel karakteristik komite audit. Beberapa variabel yang termasuk dalam karakteristik komite audit yang digunakan adalah ukuran komite audit, rapat komite audit, komisaris independen, persentase kepemilikan komite audit, dan ahli dalam komite audit. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh keefektifan komite audit dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan pada perusahaan di Inggris.

Haji dan Ghazali (2013) melakukan penelitian mengenai hubungan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Variabel independen yang digunakan antara lain ukuran dewan direksi, komisaris independen, rapat dewan direksi, dualitas CEO, keanggotaan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat utang digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian. Model penelitian Haji dan Ghazali (2013) dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4 Model penelitian pemeriksaan longitudinal pengungkapan modal intelektual dan atribut tata kelola perusahaan di Malaysia, sumber: Haji dan Ghazali (2013)

Parker (2007) mengidentifikasi akuntansi modal intelektual sebagai topik utama untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Beberapa penelitian hanya meneliti tingkat pengungkapan modal intelektual yang dilakukan perusahaan (Bukh *et al.*, 2005; Huafang & Jianguo, 2007; Cordazzo, 2007; White *et al.*, 2007; Li *et al.*, 2008; Bruggen *et al.*, 2009; Abeysekera, 2010). Penelitian lain menguji kualitas pengungkapan modal intelektual (Firer & Williams, 2003; Cerbioni & Parbonetti, 2007; Nurunnabi & Hossain, 2011). Haji dan Ghazali (2013) dalam penelitian yang dilakukan menguji baik tingkat maupun kualitas dari pengungkapan modal intelektual perusahaan di Malaysia.

Sebagian besar penelitian mengenai modal intelektual merupakan *cross-sectional* dan dilakukan secara spesifik di negara tertentu. Beberapa penelitian fokus pada aspek-aspek spesifik dari modal intelektual, seperti pengungkapan *human capital* (Jindal & Kumar, 2012; Athanasios, Antonios, & Despina, 2013) dan *internal capital* (Huang, Tayles, & Luther, 2010). Penelitian lain melakukan studi komparatif secara internasional (Cerbioni & Parbonetti, 2007).

Sampel yang digunakan dalam penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual sangat bervariasi. Beberapa penelitian melakukan penelitian pada sektor bioteknologi (Cerbioni & Parbonetti, 2007; White *et al.*, 2007), perbankan (Falikhathun *et al.*, 2009; Musalli & Ismail, 2012), dan nirlaba (Veltri & Bronzetti, 2014). Penelitian lain menggunakan perusahaan terbesar pada suatu negara yang dinilai melalui kapitalisasi pasar (Jindal & Kumar, 2012; Yau *et al.*, 2009; Zourarakis, 2013; Athanasios *et al.*, 2013; Zulkarnaen & Mahmud, 2013; Haji & Ghazali, 2013).

2.2 Pengungkapan Modal Intelektual

Menurut Saleh, Rahman, dan Hassan (2008), hingga saat ini tidak terdapat definisi modal intelektual yang diterima umum atau universal. Definisi modal intelektual menurut Stewart (1997) adalah seperangkat pengetahuan berguna yang merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada perusahaan yang menghasilkan aset bernilai tinggi dan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi perusahaan. Edvinsson dan Malone (1997) memperluas definisi modal intelektual menjadi pengetahuan yang dapat dikonversi menjadi nilai. Low dan Kalafut (2002) mendefinisikan modal intelektual sebagai aset tidak berwujud yang meliputi teknologi, informasi pelanggan, nama merek, reputasi, dan budaya perusahaan yang sangat berharga untuk daya saing suatu perusahaan.

Salah satu definisi modal intelektual yang komprehensif adalah definisi yang dipaparkan oleh *The Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) dalam Li *et al.*, (2008). Menurut CIMA, modal intelektual merupakan pengetahuan dan pengalaman, kemampuan profesional, hubungan dan kerjasama yang baik, serta kapasitas kemampuan teknologi (Li *et al.*, 2008). Menurut Sveiby (1997), modal intelektual dapat diklasifikasikan menjadi *internal capital*, *external capital*, dan *human capital*. Klasifikasi tersebut telah diterima umum karena sering digunakan pada penelitian terdahulu baik pada negara maju maupun berkembang (Guthrie & Petty, 2000; Goh & Lim, 2004; Abeysekera, 2007).

Internal capital mencerminkan kemampuan perusahaan yang berasal dari sistem, proses, struktur, budaya, strategi, kebijakan, dan kemampuan untuk melakukan inovasi. *External capital* merupakan kemampuan diperoleh dari

hubungan dengan pihak luar perusahaan dengan cara-cara yang khas, seperti koneksi, kesepahaman, loyalitas, dan aktivitas bisnis. *Human capital* merupakan kemampuan manusia dalam perusahaan yang terbentuk dari suatu gabungan beberapa atribut. Atribut tersebut seperti pengetahuan, kemampuan, sikap, dan hubungan. *Human capital* ini terletak dalam pikiran, badan, dan tindakan individual, serta akan hilang jika individual tersebut pergi meninggalkan perusahaan (Demediuk, 2002).

Menurut PSAK No. 19 (IAI, 2010), perusahaan sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan utang dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya tidak berwujud. Aset tidak berwujud yang dimaksud seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar, dan merek. Contoh umum lain adalah perangkat lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, hak memancing, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, pangsa pasar, dan hak pemasaran.

Informasi modal intelektual merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa pengungkapan yang lebih luas mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Manajer diharapkan akan dapat mengungkapkan informasi modal intelektual. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menyediakan informasi yang lebih baik mengenai posisi keuangan perusahaan dan mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor.

Beberapa cara pengukuran telah ditemukan melalui berbagai penelitian, salah satu cara untuk mengukur pengungkapan modal intelektual secara kuantitas adalah model *the Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) (Firer & Williams, 2003). Li *et al.* (2008), Abeysekera (2010), dan Haji dan Ghazali (2013) menyatakan bahwa pengungkapan modal intelektual diukur dengan *content analysis* menggunakan indeks. Melalui cara pengukuran ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah memberikan nilai pada setiap atribut yang terdapat dalam kerangka modal intelektual.

Kerangka modal intelektual yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah kerangka dari Sveiby tahun 1997 (Purnomosidhi, 2006; Li *et al.*, 2008) dan Bukh *et al.* pada tahun 2005 (Cordazzo, 2007; White *et al.*, 2007). Beberapa penelitian lain menggunakan kerangka modal intelektual yang disusun menurut kebutuhan masing-masing (Bukh *et al.*, 2005; Huafang & Jianguo, 2007; Rashid *et al.*, 2012).

Beberapa penelitian menggunakan penilaian berbobot yang bertujuan untuk menilai kualitas pengungkapan dari modal intelektual (Firer & Williams, 2003; Barako *et al.*, 2006). Setiap atribut pada indeks tersebut diberi kode angka. Penilaian untuk masing-masing perusahaan, nilai 0 diberikan untuk menunjukkan bahwa tidak ada informasi tentang atribut tersebut dalam laporan tahunan. Nilai 1 menunjukkan bahwa laporan tahunan hanya memberi informasi kualitatif tentang modal intelektual, sedangkan nilai 2 diberikan apabila laporan tahunan memberi informasi kuantitatif tentang modal intelektual (Purnomosidhi, 2006). Penelitian lain menggunakan penilaian tidak berbobot terhadap atribut modal intelektual

untuk menilai tingkat pengungkapan (Bukh *et al.*, 2005; Cordazzo, 2007; White *et al.*, 2007; Li *et al.*, 2008; Rashid *et al.*, 2012; Haji & Ghazali, 2013). Nilai 1 diberikan apabila atribut modal intelektual diungkapkan dan nilai 0 diberikan apabila atribut modal intelektual tidak diungkapkan oleh perusahaan (Huafang & Jianguo, 2007; Li *et al.*, 2008; Abeysekera, 2010).

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.3.1 Ukuran Dewan Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan. Direksi memiliki lima tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007, perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan direksi.

Tingkat pengungkapan dalam suatu perusahaan adalah keputusan strategis yang dibuat oleh dewan direksi. Sebagai bagian dari tingkat manajemen tertinggi, tugas dewan direksi merumuskan strategi dan kebijakan perusahaan yang akan diikuti oleh para manajer (Falikhatun *et al.*, 2008). Dewan direksi dengan berbagai karakteristik seperti latar belakang pendidikan dan keterampilan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mendistribusikan beban kerja (Abeysekera, 2010), memiliki pendapat yang lebih baik (Hermalin & Weisbach,

2003), dan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta lebih mewakili pemegang saham (Zhou & Chen, 2004). Menurut Akhtaruddin *et al.* (2009), ukuran dewan direksi yang besar dipandang sebagai mekanisme tata kelola yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan pengungkapan. Abeysekera (2010) menggunakan variabel ukuran dewan direksi dalam penelitian yang dilakukan dan menemukan terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran dewan direksi dengan pengungkapan modal intelektual. Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Hidalgo *et al.* (2011), Rashid *et al.* (2012), Chiedu *et al.* (2013), Moeinfar *et al.* (2013), dan Haji dan Ghazali (2013).

Hasil penelitian mengatakan bahwa ukuran dewan yang kecil dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena meningkatnya masalah agensi seiring dengan jumlah dewan direksi (Yermark, 1996). Beberapa penelitian berpendapat ukuran dewan direksi yang besar dapat mengurangi kemampuan dewan direksi untuk melakukan tindakan strategis (Goodstein, Gautam, & Boeker, 1994), memiliki masalah koordinasi (Lipton & Lorsh, 1992), dan terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan (Jensen, 1993). Hasil penelitian Barako *et al.* (2006) dan Cerbioni dan Parbonetti (2007) juga menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan negatif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun *et al.* (2008) di Indonesia, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi dengan pengungkapan modal intelektual. Hal tersebut dikarenakan jumlah

dewan direksi belum menunjukkan perhatian serius pada modal intelektual, tetapi keberadaan dewan direksi hanya fokus pada kinerja perusahaan.

2.3.2 Komisaris Independen

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja direksi dalam menjalankan usaha perseroan. Dewan komisaris memberikan masukan dan pertimbangan lain mengenai isu-isu material kepada direksi dan mendorong penerapan tata kelola yang baik di lingkungan perseroan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lain dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. KEP-305/BEJ/07-2004 mengatur jumlah komisaris independen dalam perusahaan publik ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris atau paling sedikit satu orang (Bursa Efek Jakarta, 2004).

Salah satu peran penting dari dewan adalah untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Perusahaan diharapkan untuk dapat melindungi kepentingan pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan manajemen sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Kemampuan untuk pemantauan ini dapat meningkat dengan jumlah komisaris independen yang lebih besar. Pengungkapan dapat mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi yang dihadapi pemegang

saham, sehingga komisaris independen dapat mempengaruhi jumlah pengungkapan dengan arah positif (Cordazzo & Vergauwen, 2012).

Haniffa dan Cooke (2005) berpendapat bahwa komisaris independen berpengaruh dalam keputusan kebijakan pengungkapan pada suatu perusahaan. Hal tersebut dikarenakan komisaris independen memiliki peran penting dalam meyakinkan bahwa kepentingan pemegang saham dilindungi dengan baik (Fama, 1980). Penelitian yang dilakukan oleh Li *et al.* (2008) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen yang besar dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan posisi perusahaan secara lebih dan untuk lebih proaktif dalam merefleksikan nilai-nilai perusahaan yang berhubungan dengan modal intelektual kepada pemangku kepentingan.

Cordazzo dan Vergauwen (2012) menyiratkan bahwa apabila investor bersedia untuk menanamkan modal pada perusahaan dan ingin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk dipantau oleh dewan serta pengungkapan yang luas, maka investor harus memilih perusahaan dengan jumlah komisaris independen yang besar. Hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal intelektual juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cerbioni dan Parbonetti (2007), Huafang dan Jianguo (2007), White *et al.* (2007), Akhtaruddin *et al.* (2009), Rashid *et al.* (2012), dan Haji dan Ghazali (2013).

Zulkarnaen dan Mahmud (2013) telah melakukan penelitian di Indonesia dengan menggunakan variabel independen komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara proporsi komisaris

independen dengan pengungkapan modal intelektual. Komisaris independen kurang memiliki peran saat perusahaan menyusun laporan tahunan tentang modal intelektual. Hal tersebut diperkirakan karena masih kurangnya informasi mengenai pentingnya pengungkapan sukarela dan faktor iklim pasar modal yang belum stabil pada 2009, sehingga perusahaan cenderung mengutamakan pelaporan yang berhubungan langsung dengan kinerja. Beberapa penelitian lain yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001), Moeinfar *et al.* (2013), dan Chiedu *et al.* (2013).

2.3.3 Ukuran Komite Audit

Pengawasan dewan adalah suatu fungsi yang bukan hanya dari struktur dan komposisi dari dewan komisaris, tetapi juga dari subkomite dewan komisaris di mana banyak proses dan keputusan penting dilakukan dan diawasi (Li *et al.*, 2008). Pengawasan ini dilakukan oleh komite yang disebut komite audit. Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2004).

Suatu komite audit terdiri dari mayoritas komisaris independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan untuk memberikan suatu penilaian yang lebih akurat dari keputusan dan kinerja manajemen puncak (Cerbioni & Parbonetti, 2007). Menurut Barako *et al.* (2007), dewan mendelegasikan tanggung jawab untuk pengawasan pelaporan keuangan kepada

komite audit untuk meningkatkan luas relevansi dan reliabilitas dari laporan tahunan. Komite audit mempunyai peran yang besar di dalam perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit dapat menjadi suatu mekanisme pengawasan yang memperbaiki kualitas arus informasi antara pemilik perusahaan dan manajer terutama dalam lingkungan pelaporan keuangan.

Peran dari komite audit telah berkembang bertahun-tahun untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan bisnis, sosial, dan ekonomi. Keberadaan komite audit terkait erat dengan pelaporan keuangan yang lebih dapat diandalkan (Li *et al.*, 2008), peningkatan kualitas laporan keuangan, dan peningkatan pengungkapan pada laporan keuangan (Ho & Wong, 2001). Nurunnabi dan Hossain (2011), Hidalgo *et al.* (2011), dan Li *et al.* (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit yang besar cenderung mengungkapkan lebih banyak mengenai modal intelektual di laporan tahunan.

Hasil penelitian yang lain menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran komite audit dan pengungkapan modal intelektual (Akhtaruddin *et al.*, 2009; Taliyang & Jusop, 2011; Zulkarnaen & Mahmud, 2013). Akhtaruddin *et al.* (2009) menyatakan bahwa dibandingkan dengan jumlah komite audit, kualitas dari komite audit lebih menentukan efektifitas kerja komite audit dalam menjamin transparansi.

2.3.4 Rapat Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-29/PM/2004, komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar (Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Price Waterhouse Coopers pada tahun 1993 merekomendasikan bahwa komite audit harus mengadakan minimal tiga atau empat pertemuan setiap tahun dan pertemuan khusus ketika diperlukan (Li *et al.*, 2008).

Komite audit yang efektif sebagai suatu alat pemantauan yang kuat untuk meningkatkan nilai relevan atas pengungkapan modal intelektual. Komite audit yang tidak aktif tidak mungkin mengawasi manajemen secara efektif dan waktu pertemuan yang cukup harus disediakan untuk pertimbangan isu-isu yang utama. Komite audit harus aktif mengawasi manajemen dan mengadakan pertemuan secara rutin (Li *et al.*, 2008). Jumlah rapat komite audit yang diadakan selama suatu periode dianggap menjadi tolak ukur untuk menilai ketekunan komite audit, dengan antisipasi bahwa semakin sering komite audit melakukan rapat maka lebih banyak kemungkinan untuk melaksanakan tugas-tugas komite audit (Xie, Davidson, & DaDalt, 2003). Frekuensi pertemuan komite audit yang lebih sering akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengatur praktik pengungkapan modal intelektual dan meminimalisasi asimetri informasi (Li *et al.*, 2008).

Li *et al.* (2008) membuktikan dalam penelitian yang dilakukan untuk meneliti pengaruh antara mekanisme tata kelola perusahaan dan pengungkapan modal intelektual di Inggris, bahwa terdapat hubungan positif antara frekuensi pertemuan komite audit dengan tingkat pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian yang serupa juga dibuktikan pada penelitian-penelitian yang kemudian dilakukan oleh Taliyang dan Jusop (2011), Azman dan Kamaluddin (2012), dan Li *et al.* (2012).

2.3.5 Auditor Eksternal

Menurut Barako *et al.* (2007), meskipun secara keseluruhan adalah tanggung jawab manajemen untuk menyiapkan laporan tahunan, sebuah perusahaan audit eksternal dapat mempengaruhi secara signifikan jumlah informasi yang diungkapkan. Nurunnabi dan Hossain (2011) menyatakan bahwa perusahaan audit besar memiliki pengaruh yang lebih pada klien yang dimiliki untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dari batas minimum. Perusahaan audit yang besar menginvestasikan lebih banyak untuk memelihara reputasi sebagai penyedia audit berkualitas daripada perusahaan yang lebih kecil.

Kualitas yang dimiliki oleh kantor akuntan publik memungkinkan untuk dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pemakai eksternal terhadap laporan (Barako, *et al.* 2007). Hal ini didukung oleh Jindal dan Kumar (2012) yang menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan perusahaan audit kecil, perusahaan besar cenderung menuntut pengungkapan dengan kualitas yang lebih tinggi dari klien. Zourarakis (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara auditor eksternal dengan pengungkapan modal intelektual.

Nurunnabi dan Hossain (2011) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Rashid *et al.* (2012) dan Ousama *et al.* (2012) yang menunjukkan bahwa perusahaan audit besar tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan di laporan tahunan perusahaan.

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen

2.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran dari suatu perusahaan telah dikaitkan secara positif dengan praktik pengungkapan modal intelektual (Cerbioni & Parbonetti, 2007; Li *et al.*, 2008; Hidalgo *et al.*, 2011). Perusahaan besar cenderung memiliki banyak aktifitas dan beberapa unit bisnis yang memiliki faktor kesuksesan yang berbeda. Hal tersebut berarti informasi lebih luas perlu diungkapkan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai perusahaan kepada pemangku kepentingan (Bozzolan *et al.*, 2003). Menurut Ousama *et al.* (2012), perusahaan besar diawasi oleh masyarakat dan pemerintah sehingga perusahaan cenderung melakukan pengungkapan lebih atas informasi perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh Haji dan Ghazali (2013) yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, lebih transparan, dan tunduk pada peningkatan permintaan informasi oleh pihak luar. Bozzolan *et al.* (2003), Firer dan Williams (2003), Purnomoshidi (2006), Cordazzo (2007), White *et al.* (2007), Li *et al.* (2008), Yau *et al.* (2009), Bruggen *et al.* (2009), dan Ousama *et al.* (2012) juga menunjukkan dalam penelitian yang dilakukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian lain menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan tidak signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual (Bukh *et al.*, 2004; Rimmel *et al.*, 2009; Rashid *et al.*, 2012). Rimmel *et al.* (2009) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan bukan faktor yang signifikan dalam menjelaskan pengungkapan informasi secara sukarela.

2.4.2 Tingkat Utang

Perusahaan dengan persentase tingkat utang yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk tujuan mengumpulkan dana dari investor. White *et al.* (2007) menyatakan bahwa perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi cenderung memiliki biaya agensi yang lebih tinggi dan membutuhkan pengawasan yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan perusahaan berusaha mengurangi biaya pengawasan melalui pengungkapan informasi perusahaan yang lebih luas.

Jensen dan Meckling (1976) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin luas pengungkapan informasi yang diungkapkan perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan memiliki kewajiban terhadap pemegang saham dan untuk menghilangkan keragu-raguan para kreditor.

Penelitian dengan menggunakan variabel tingkat utang telah dilakukan di Indonesia oleh Purnomosidhi (2006) dan Falikhatun *et al.* (2009). Hasil menunjukkan pengaruh signifikan positif antara tingkat utang dan pengungkapan modal intelektual. Hasil yang serupa ditampilkan dalam penelitian yang dilakukan di Australia (White *et al.*, 2007; Woodcock & Whiting, 2011), Meksiko (Hidalgo *et al.*, 2011), dan Malaysia (Rashid *et al.*, 2012; Haji & Ghazali, 2013).

Ousama *et al.* (2012) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat utang dengan pengungkapan modal intelektual pada suatu perusahaan. Selain pengungkapan dalam laporan tahunan, perusahaan dapat mengandalkan saluran komunikasi lain untuk mengurangi konflik antara penyedia

modal dan manajer. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hidalgo *et al.* (2010) dan Jindal dan Kumar (2012).

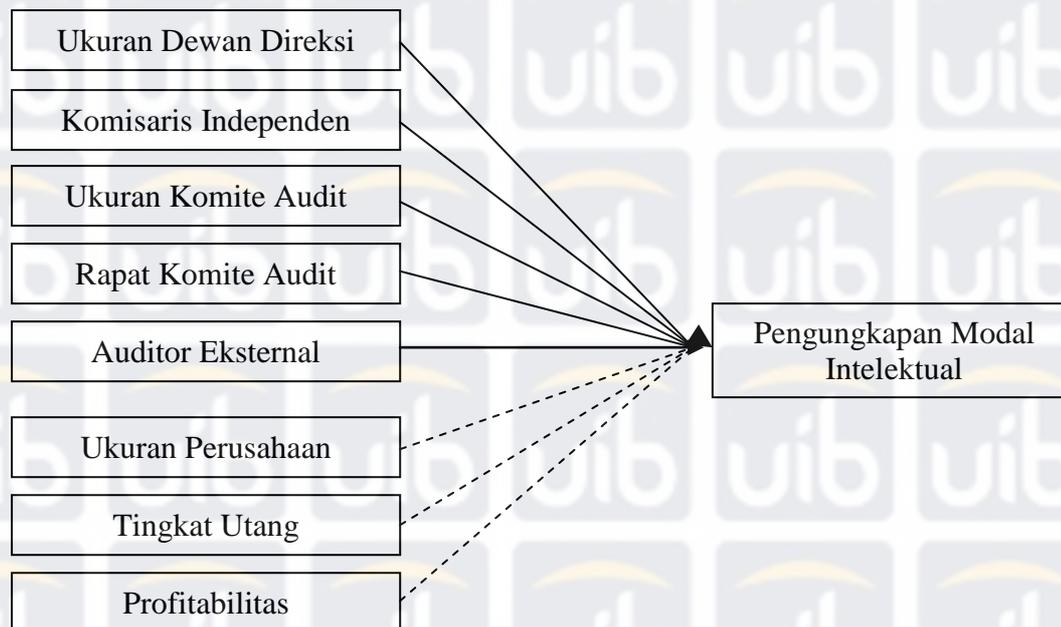
2.4.3 Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan menunjukkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik, sehingga perusahaan akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk menyampaikan peningkatan profitabilitas tersebut ke pasar. Hal lain yang mendukung hubungan positif antara pengungkapan sukarela dengan profitabilitas adalah upaya perusahaan untuk membedakan kinerja perusahaan dengan kompetitor lain yang memiliki profitabilitas lebih rendah sehingga memudahkan pengumpulan dana (Khodadadi, Khazami, & Aflatoon, 2010).

Ousama *et al.* (2012) menemukan hasil signifikan positif antara profitabilitas dengan pengungkapan modal intelektual. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mungkin memiliki insentif sebagai informasi bahwa perusahaan lebih baik dengan mengungkapkan lebih banyak mengenai modal intelektual. Hal tersebut dikarenakan modal intelektual dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap prestasi perusahaan. Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh penelitian-penelitian lain (White *et al.*, 2007; Li *et al.*, 2008; Yau *et al.*, 2009; Rahim, Atan, & Kamaluddin, 2011; Haji & Ghazali, 2013).

2.5 Model Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan meneliti struktur tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual. Model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.5 Model penelitian analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.

2.6 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

H₂: Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

H₃: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

H₄: Rapat komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

H₅: Auditor eksternal berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.